

*Catatan
Kritis*

1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran





Indonesia Corruption Watch
2025

Catatan Kritis 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Patronase, Kroniisme, & Kemunduran Pemberantasan Korupsi

Indonesia Corruption Watch
Jakarta, 2025

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan, 12740, Indonesia

www.antikorupsi.org

Daftar Isi

Pengantar	1
Asta Cita dan Politik Pencitraan Antikorupsi	2
Kabinet Kotor: Dari Rangkap Jabatan hingga Rekam Jejak Korup	3
Pembabatan Anggaran dan Dampaknya Terhadap Warga	4
Dari MBG hingga Koperasi Merah Putih: Potret Tata Kelola yang Ugal-Ugalan	5
Basa-basi Penegakan Hukum	8
DPR: Mandul dalam Pengawasan, Tunduk pada Prabowo-Gibran	10
Gelapnya Masa Depan Pemberantasan Korupsi	11

Pengantar

Satu tahun setelah berkuasa, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mulai memperlihatkan arah dan watak aslinya dalam pemberantasan korupsi. Janji dan komitmen untuk melenyapkan korupsi dari republik tak selaras dengan kenyataan di lapangan. Alih-alih memperkuat penegakan hukum dan menempuh langkah-langkah strategis, Prabowo-Gibran justru memilih untuk melanggengkan status quo pelemahan pemberantasan korupsi.

Tidak ada langkah berarti dalam mengembalikan independensi pemberantasan korupsi, dan memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas masih jalannya pemerintahan. Lebih buruk, pengawasan publik secara konsisten diperlemah. Selama satu tahun terakhir, sejumlah kebijakan yang dikeluarkan mencerminkan praktik politik patronase dan keberpihakan pada kepentingan kroni ketimbang kepentingan publik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Danantara misalnya, dilaksanakan secara ugal-ugalan tanpa perencanaan matang. Partisipasi publik dipinggirkan, membuat pengawasan semakin sulit untuk dilakukan. Padahal, kedua kebijakan tersebut menghabiskan triliunan rupiah anggaran yang berasal dari pajak warga. Di samping itu kebijakan-kebijakan lain berjalan dengan pola serupa, sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mengabaikan prinsip pemerintahan yang baik, dan tidak menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan kritis terhadap satu tahun Prabowo-Gibran. Dalam catatan ini, kami beranggapan bahwa satu tahun pemerintahan telah memberikan sinyal kegagalan dalam pemberantasan korupsi. Catatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa sikap kritis, pengawasan, dan tekanan publik diperlukan guna memastikan pemberantasan korupsi berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih, praktik korupsi elektoral, berupa skandal manipulasi aturan pemilu guna memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming hingga maraknya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024, telah memberi tanda awal bahwa pemberantasan korupsi bukanlah prioritas pemerintahan ini.

Asta Cita dan Politik Pencitraan Antikorupsi

Dalam janji Asta Cita, Prabowo-Gibran menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama. Poin tujuh dari Asta Cita berbunyi: “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Namun, dalam praktiknya, komitmen itu tidak pernah benar-benar dijalankan.

Agenda reformasi politik tidak dijalankan secara serius. Alih-alih melakukan perubahan terhadap sistem kepartaian dan pemilihan, memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta *check and balances*, Prabowo-Gibran justru melakukan langkah-langkah yang bertentangan. Ini meliputi politik transaksional bagi-bagi jabatan, konsolidasi partai untuk menihilkan ruang oposisi, politik patronase, serta proses legislasi yang tertutup dan terburu-buru. Padahal langkah-langkah tersebut diperlukan guna mencegah praktik korupsi untuk semakin meluas.

Dalam hal penegakan hukum, Prabowo-Gibran tidak mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana akibat dari revisi UU KPK tahun 2019. Reformasi kepolisian berjalan tanpa arah yang jelas. Kejaksan pun tidak dipastikan akuntabilitas dan pengawasannya. Kondisi tersebut dapat berakibat pada *rule by law*, yakni hukum dijadikan alat kekuasaan. Sementara yang dibutuhkan adalah prinsip *rule of law*, agar penegakan hukum kasus korupsi dapat berjalan baik.

Prabowo-Gibran juga tidak menjadikan reformasi birokrasi sebagai agenda serius. Padahal, pantauan ICW dari tahun ke tahun selalu menunjukkan birokrasi sebagai pelaku korupsi yang dominan. Tidak ada langkah berarti dalam mendorong kultur integritas dan etika publik, penyederhanaan birokrasi, atau bersih-bersih kelompok atau individu dalam birokrasi yang bermasalah. Prabowo-Gibran malah membentuk kabinet gemuk yang bertentangan dengan agenda reformasi birokrasi. Total terdapat 48 Kementerian dan 5 Badan pada awal pelantikan Kabinet Merah Putih, untuk kemudian bertambah lagi pada tahun 2025 menjadi 49 Kementerian. Selain itu, praktik rangkap jabatan dalam birokrasi dan BUMN diperbolehkan, sementara jabatan publik juga diisi oleh perwira aktif militer dan polisi. Prabowo-Gibran justru memilih langkah yang jelas bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Kabinet Kotor: Dari Rangkap Jabatan hingga Rekam Jejak Korup

Prabowo-Gibran membentuk kabinet Merah Putih dengan komposisi yang menunjukkan praktik politik kartel: kekuasaan dibagi rata antara para pendukungnya agar stabilitas terjaga. Pengangkatan anggota kabinet dan jabatan strategis lainnya tidak mempertimbangkan integritas, kompetensi, dan rekam jejak.

Prabowo-Gibran mengawalinya dengan membuat komposisi kabinet yang gemuk: jumlah kementerian yang semula 34 ditambah menjadi 48. Dari jumlah tersebut, terdapat setidaknya 56 wakil menteri. Hal ini menjadikan Kabinet Merah Putih sebagai kabinet paling gemuk sepanjang sejarah Orde Baru hingga Reformasi. Penambahan jumlah kementerian ini mencerminkan praktik bagi-bagi kekuasaan yang sarat akan balas budi politik. Langkah ini bukan hanya mencerminkan politik kartel yang berbasis transaksi kekuasaan, namun juga pemborosan anggaran besar-besaran tanpa agenda yang jelas.

Selain itu, Prabowo-Gibran mengabaikan prinsip integritas, kompetensi, dan rekam jejak dalam pengangkatan kabinet dan jabatan strategis. ICW mencatat terdapat sejumlah nama yang terhubung dengan kasus korupsi, mulai dari berstatus saksi, disebut-sebut dalam fakta persidangan, hingga menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Mereka antara lain Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo, serta Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, sebelum dilengserkan pada September 2025.

Pengangkatan jabatan strategis secara serampangan ini kemudian terbukti berujung pada kasus korupsi. Contohnya adalah kasus yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Belum genap satu tahun menjabat, Noel terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2025 dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Prabowo-Gibran diduga memberikan posisi Wamenaker kepada Immanuel lantaran dalam Pemilu

2024 ia adalah pendiri kelompok relawan bernama Prabowo Mania.¹ Tanpa ada perombakan kabinet, maka beragam bentuk praktik korupsi akan terus berulang.

Pembabatan Anggaran dan Dampaknya Terhadap Warga

Prabowo-Gibran memangkas anggaran publik demi ambisi kekuasaan dan menguntungkan kroni-kroninya. Anggaran yang dipangkas dialihkan untuk program-program prioritas seperti MBG dan Danantara,² yang diduga kuat merupakan instrumen politik patronase sekaligus untuk memperkaya lingkaran kroni-kroninya. Sementara itu, publik menerima dampak buruk dari pemotongan anggaran tersebut.

Melalui Instruksi Presiden 1/2025, sebanyak Rp 306,69 triliun anggaran publik di level pusat dan daerah dipangkas.³ Dalihnya adalah anggaran dipotong untuk alasan efisiensi, agar tak ada pemborosan untuk aktivitas yang tak perlu.⁴ Dalam pemotongan tersebut, Prabowo-Gibran juga memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Melalui Keputusan Menteri Keuangan 29/2025, anggaran TKD tahun 2025 dipotong hingga Rp 50,59 triliun.⁵ dengan total anggaran Rp 848,52 triliun. Pada tahun 2026, anggaran TKD kembali dipotong dan berjumlah total Rp 693 triliun.⁶

Dalih Prabowo-Gibran seolah menunjukkan dukungan terhadap pemberantasan korupsi melalui politik anggaran yang berpihak pada publik. Namun, alasan tersebut patut diragukan mengingat Prabowo tidak memberikan alasan yang jelas dan terbuka kepada publik. Tidak ada informasi mengenai hasil evaluasi kebijakan yang mendasari keputusan

¹ Tempo, "Karier Moncer Immanuel Ebenezer: Dari Driver Ojol hingga Jadi Wakil Menteri", <https://www.tempo.co/politik/karier-moncer-immanuel-ebenezer-dari-driver-ojol-hingga-jadi-wakil-menteri-2062144>, 23 Agustus 2025

² Kompas.id, "Efisiensi Anggaran Dipakai untuk MBG dan Danantara, Apa Dampaknya ke Rakyat?", <https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-dipakai-untuk-mbg-dan-danantara-apa-da-mpaknya-ke-rakyat>, 17 Februari 2025

³ Antara News, "Pemangkasan Anggaran: Belajar Dari Pengalaman Negara Lain.", <https://www.antaranews.com/berita/4646389/pemangkasan-anggaran-belajar-dari-pengalaman-negara-lain>, 13 Februari 2025

⁴ Ibid.,

⁵ Antara News, "Sri Mulyani pangkas dana transfer ke daerah Rp50,59 triliun", <https://sulteng.antaranews.com/berita/339501/sri-mulyani-pangkas-dana-transfer-ke-daerah-rp-5059-triliun>, 6 Februari 2025

⁶ Kompas.id, "Dana Transfer Daerah Dipangkas, Mendagri: Efisiensi Belanja Birokrasi", <https://www.kompas.id/artikel/dana-transfer-daerah-dipangkas-mendagri-efisiensi-belanja-birokrasi>, 16 Oktober 2025

pemangkasan anggaran. Selain itu, prosesnya berlangsung secara kilat dan terburu-buru.

Lebih jauh, kebijakan tersebut akan menimbulkan setidaknya dua persoalan. Pertama, pemangkasan anggaran berpotensi menghambat pelayanan publik.⁷ Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar dipangkas sekitar 23,8 persen dari Rp33,5 triliun,⁸ sehingga akses terhadap pendidikan dapat terhambat. Ironisnya, pemangkasan anggaran di sektor keamanan sangat minim. Anggaran Kementerian Pertahanan hanya dipangkas 16,1 persen⁹ dari Rp166,2 triliun.

Kedua, pemotongan TKD berpotensi menurunkan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai urusan publik, serta memaksa pemerintah daerah mencari cara untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang membebani warga. Contohnya adalah kenaikan pajak di berbagai daerah yang diduga untuk menambal kekurangan anggaran. Itu antara lain kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di 104 daerah. 20 daerah diantaranya bahkan menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.¹⁰ Protes warga di Kabupaten Pati dan Kabupaten Bone diduga kuat merupakan respons atas kebijakan tersebut.

Dari MBC hingga Koperasi Merah Putih: Potret Tata Kelola yang Ugal-Ugalan

Terdapat sejumlah kebijakan prioritas pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran, namun memperlihatkan tata kelola yang amburadul. Kebijakan tersebut antara lain program MBC, Danantara, dan Koperasi Merah Putih. Kebijakan-kebijakan tersebut terlaksana tanpa perencanaan yang matang, dan dilaksanakan secara serampangan. Itu kemudian berakibat pada pemborosan anggaran, potensi penyelewengan, dan pelanggaran terhadap hak warga.

⁷ Tempo, "Efisiensi Anggaran Akan Pengaruhi Pelayanan Publik Di Beberapa Kementerian Dan Lembaga",

<https://www.tempo.co/politik/efisiensi-anggaran-akan-pengaruhi-pelayanan-publik-di-beberapa-kementerian-dan-lembaga-1208094>, 17 Februari 2025

⁸ BBC News Indonesia, "Efisiensi Anggaran: Anggaran Pendidikan Dasar Dan Menengah Dipangkas Rp8 Triliun – Bagaimana Nasib Guru Honorer Dan Pembangunan Sekolah?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgxe99qyznq>, 10 Februari 2025

⁹ CNN Indonesia, "Rincian Efisiensi Kemhan Dan TNI, Total Tembus Rp26,9 Triliun.", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250214062925-20-1198121/rincian-efisiensi-kemhan-dan-tni-total-tembus-rp269-triliun>, 14 Februari 2025

¹⁰ Tempo, "Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB, 20 Daerah Naik Di Atas 100 Persen.", <https://www.tempo.co/politik/kemendagri-104-daerah-naikkan-pbb-20-daerah-naik-di-atas-100-persen-2060902>, 20 Agustus 2025.

Program MBG pada tahun 2025 mendapat kucuran dana hingga Rp 71 triliun, dan pada tahun 2026 bertambah menjadi Rp 335 triliun.¹¹ Ironisnya, sampai 12 Oktober 2025, sebanyak 11.566 anak menjadi korban keracunan dari program tersebut. Pemerintah juga tidak mengambil langkah akuntabel atas skandal tersebut. Alih-alih menghentikan program dan melakukan evaluasi total, pemerintah justru membiarkannya tanpa koreksi yang berarti.

Program MBG selain itu bermasalah lantaran menjadi cerminan politik patronase, kroniisme, dan konflik kepentingan. Hal itu kemudian berpotensi berdampak terhadap pengawasan program tersebut. Para pelaksana program yang mengelola dapur MBG terhubung dengan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.¹² Bahkan hingga akhir September 2025, tercatat sedikitnya 339 dapur dikelola oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)¹³ dan 102 dapur oleh Kepolisian RI (Polri), dengan jumlah yang akan terus bertambah.¹⁴ Dapur MBG selain itu terhubung dengan politisi legislatif level nasional.¹⁵ Lebih buruk, rincian anggaran dan proses pengadaan MBG tidak transparan. Hingga pertengahan Oktober 2025, dasar peraturan pelaksanaan MBG juga tidak kunjung dikeluarkan.

Serupa dengan MBG, program lain yaitu Danantara dan Koperasi Merah Putih memboroskan anggaran publik, disusun secara asal-asalan, dan membuka lebar celah korupsi. Pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan Rp 300 triliun pajak warga untuk Danantara.¹⁶ Akan tetapi, terdapat masalah transparansi, kekebalan hukum, dan bagi-bagi jatah dalam pelaksanaannya. Publik tidak mengetahui mekanisme penentuan investasi serta anggaran yang akan digelontorkan, termasuk proyek-proyek yang akan didanai oleh Danantara. Sehingga, proyek-proyek yang didanai Danantara berpotensi menjadi bancakan. Kemudian, UU 1/2025 tentang BUMN mengharuskan persetujuan DPR untuk melakukan audit terhadap

¹¹ [Kompas.com](https://money.kompas.com/read/2025/09/24/114657126/mbg-2026-sedot-rp-335-triliun-ambil-jatah-pendidikan-rp-223-triliun), "MBG 2026 Sedot Rp 335 Triliun, Ambil Jatah Pendidikan Rp 223 Triliun", <https://money.kompas.com/read/2025/09/24/114657126/mbg-2026-sedot-rp-335-triliun-ambil-jatah-pendidikan-rp-223-triliun>, 24 September 2025

¹² Tempo, "Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis", <https://www.tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283>, 20 April 2025

¹³ Metro TV Jateng & DIY, "Panglima TNI Membuka 339 Dapur MBG di Seluruh Satuan TNI", https://www.youtube.com/watch?v=rlkz_etTB1Q, 30 September 2025

¹⁴ Tempodotco, "617 Unit Dapur MBG Polri Masuk Peta Pembangunan Nasional", <https://www.youtube.com/watch?v=qR-V8XAdO0U&pp=ygUPcG9scmkqZGFwdXlgTUJH>, 22 September 2025

¹⁵ [Tempo.co](https://www.tempo.co), "Badan Gizi Nasional Akui Ada Anggota DPR Punya Dapur MBG", <https://www.tempo.co/politik/badan-gizi-nasional-akui-ada-anggota-dpr-punya-dapur-mbg-2072349>, 23 September 2025

¹⁶ [Detik.com](https://www.detik.com), "Rp 300 T Hasil Efisiensi Anggaran Dialokasikan ke Danantara", <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7792646/rp-300-t-hasil-efisiensi-anggaran-dialokasikan-ke-danantara>, 24 Februari 2025

Danantara. Selanjutnya, alih-alih dikelola oleh para individu yang profesional dan independen, pengurus Danantara justru diisi oleh para elite politisi dan oligark yang dekat dengan lingkaran Prabowo-Gibran.

Program Koperasi Merah Putih akan menghabiskan pajak warga hingga Rp 83 triliun. Anggaran tersebut akan diberikan dalam bentuk kredit bagi Koperasi Merah Putih dengan batas pinjaman hingga Rp3 miliar. Persoalannya, penyalahgunaan anggaran dan politik patronase berpotensi terjadi dalam pelaksanaannya. Tanpa ada transparansi dan pengawasan yang ketat, maka anggaran Rp 3 miliar rentan untuk disalahgunakan. Temuan ICW pada tahun 2023 menunjukkan kasus korupsi marak terjadi di desa dengan jumlah 187 kasus, dan anggaran publik sebagai salah satu objek korupsinya. Di samping itu, tanpa ada tata kelola yang ketat, anggaran Koperasi Merah Putih dapat menjadi alat politik patronase elite lokal untuk berbagi-bagi jatah.

Manipulasi Hukum: Melanjutkan Skandal Lama

Praktik manipulasi aturan dalam era rezim Joko Widodo berlanjut di era Prabowo-Gibran. Hukum tetap dijadikan alat guna memuluskan kepentingan politik. Di era Joko Widodo, skandal manipulasi aturan dicirikan oleh proses legislasi yang tertutup dan terburu-terburu. Berbagai produk hukum bermasalah disahkan; revisi UU KPK, revisi UU Mineral dan Batubara (Minerba), UU Cipta Kerja, revisi UU IKN, dan lain sebagainya. Rezim Prabowo-Gibran kemudian terus melanjutkannya.

Prabowo-Gibran pertama-tama mengesahkan revisi UU BUMN pada 4 Februari 2025. Revisi UU BUMN dilakukan guna memuluskan rencana pembentukan Danantara, serta memberikan kekebalan hukum terhadapnya. Danantara kemudian dibentuk tanpa transparansi, dan diisi oleh individu atau kelompok yang merupakan kroni-kroni dari Prabowo-Gibran: dari mulai elite politisi hingga pebisnis pendukungnya. Padahal, UU BUMN idealnya direvisi dengan tujuan memperbaiki BUMN. Berdasarkan catatan ICW, sepanjang tahun 2016-2023¹⁷, terdapat sedikitnya 212 kasus korupsi yang ada di lingkungan BUMN. Negara bahkan merugi hingga Rp 64 triliun.

¹⁷ Indonesia Corruption Watch, "Pasca UU BUMN Terbaru, Korupsi di Perusahaan Pelat Merah Akan Semakin Menjamur!", <https://antikorupsi.org/id/pasca-uu-bumn-terbaru-korupsi-di-perusahaan-pelat-merah-akan-semakin-menjamur>, 8 Mei 2025

Berikutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran memuluskan pembahasan revisi UU Minerba pada 18 Februari 2025. Revisi tersebut menjadikan UU Minerba sebagai alat tambahan untuk melakukan praktik politik patronase. Dalam revisi yang disahkan, ormas kini dapat mengelola pertambangan. Revisi diduga kuat dilakukan untuk merawat jejaring patronase yaitu ormas guna mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Manipulasi hukum berikutnya tercermin melalui revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025. Pemerintahan Prabowo-Gibran berdalih bahwa pemerintah tengah melakukan “penyesuaian regulasi” dan “penguatan peran TNI dalam menghadapi tantangan baru”. Padahal, melalui revisi UU tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran tengah berupaya melegitimasi keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, sebuah langkah mundur yang menghidupkan kembali dwifungsi militer dan bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Selain produk legislasi, manipulasi aturan lain tercermin dalam Peraturan Presiden 46/2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Perpres PBJ). Manipulasi diduga dilakukan guna memperlancar proyek-proyek prioritas pemerintah, seperti MBC. Dalam pasal 38 ayat (5) huruf a Perpres PBJ memperbolehkan penunjukan langsung penyedia barang jasa untuk proyek prioritas pemerintah atau bantuan presiden. Artinya, pengadaan yang berkaitan dengan MBC dapat dilakukan tanpa ada proses yang ketat.

Selain itu, terdapat peningkatan ambang batas pengadaan langsung yang memungkinkan transaksi bernilai hingga Rp400 juta dan maksimal Rp100 miliar tanpa kewajiban tender terbuka. Maka, Perpres PBJ memberikan kewenangan yang terlalu besar bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan pengadaan barang jasa, yang pada akhirnya dapat membuka celah penyelewengan.

Basa-basi Penegakan Hukum

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Alih-alih memperkuat aparat penegak hukum dengan memastikan akuntabilitas dan independensi, pemerintahan ini justru menggunakan penegakan hukum untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Upaya-upaya penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi berhenti sebatas jargon. Pembahasan RUU Perampasan Aset mandek tanpa kejelasan. Tidak ada

satu langkah konkret yang dilakukan. Lebih buruk lagi, Prabowo bahkan pernah mengemukakan wacana pengampunan koruptor.

Prabowo melakukan intervensi penegakan hukum yang diduga kuat adalah bagian konsolidasi kekuasaan. Ia mencatat sejarah baru sebagai Presiden RI pertama yang memberikan abolisi dan amnesti kepada terdakwa tindak pidana korupsi. Penerima abolisi adalah Thomas Trikasih Lembong, Mantan Menteri Perdagangan era Jokowi dari tahun 2015 hingga 2016. Sedangkan penerima amnesti adalah Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP. Thomas Lembong merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015 hingga 2016. Sementara, Hasto diduga terlibat dalam dugaan kasus suap Komisioner KPU untuk pengurusan Penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.

Meskipun secara hukum merupakan hak prerogatif presiden, pemberian abolisi dan amnesti menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah pemberantasan korupsi. Sebab, pemberian ini merupakan bentuk intervensi terhadap jalannya penegakan hukum pemberantasan korupsi yang seharusnya bebas dari pengaruh mana pun. Presiden semestinya memberikan penjelasan mengenai koreksi yang ingin dicapai dengan memberikan abolisi dan amnesti. Tanpa adanya hal tersebut, maka patut diduga pemberian abolisi dan amnesti adalah langkah politis. Pemberian abolisi dan amnesti ini diduga merupakan bentuk politik transaksional antara Prabowo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selang beberapa hari setelah pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto,¹⁸ Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo.¹⁹ Rangkaian peristiwa ini menimbulkan dugaan kuat bahwa keputusan amnesti bukan murni penegakan hukum, melainkan bentuk kompromi politik. Karena itu, pemberian amnesti tersebut mencerminkan penyelesaian perkara korupsi melalui jalur politik yang mencederai prinsip keadilan.

Selain itu, upaya perbaikan kinerja aparat penegak hukum belum menunjukkan hasil positif. ICW mencatat, selama bulan Oktober hingga Desember 2024, terdapat 131 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, namun minim transparansi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari prinsip akuntabilitas dan keterbukaan.

¹⁸ [Detik.com](https://news.detik.com/berita/d-8044178/hasto-kristiyanto-jadi-satu-satunya-tahanan-kpk-dapat-amnesti-dari-prabowo), "Hasto Kristiyanto Jadi Satu-satunya Tahanan KPK Dapat Amnesti dari Prabowo", <https://news.detik.com/berita/d-8044178/hasto-kristiyanto-jadi-satu-satunya-tahanan-kpk-dapat-amnesti-dari-prabowo>, 4 Agustus 2025

¹⁹ [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/00515671/megawati-perintah-kader-pdip-dukung-pemerintahan-prabowo), "Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo", <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/00515671/megawati-perintah-kader-pdip-dukung-pemerintahan-prabowo>, 1 Agustus 2025

Prabowo-Gibran juga belum mampu mengatasi persoalan di tubuh instansi penegak hukum seperti Kepolisian RI. Langkah yang diambil justru berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan. Untuk mengatasi masalah pada instansi kepolisian misalnya, pemerintah membuat Komisi Reformasi Kepolisian yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi perbaikan di tubuh kepolisian. Komisi ini disebut akan berisi 9 orang yang terdiri dari masyarakat sipil, pejabat negara, dan mantan Kapolri. Namun, hingga pertengahan Oktober 2025, 9 orang tersebut tak kunjung dilantik oleh Prabowo.

Di sisi lain, Kapolri juga membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang diisi oleh 52 perwira tinggi dan menengah. Tim ini memiliki mandat serupa, yaitu memberikan data dan evaluasi untuk perbaikan Polri. Akibatnya, kedua tim tersebut berpotensi tumpang tindih dalam hal tugas dan kewenangannya tugasnya. Tanpa kejelasan mandat dan arah, upaya reformasi kepolisian tak akan menghasilkan perubahan yang berarti.

DPR: Mandul dalam Pengawasan, Tunduk pada Prabowo-Gibran

Selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, DPR semakin kehilangan fungsi *check and balances*-nya. Alih-alih bertugas sebagai pengawas, DPR justru berfungsi sebagai alat legitimasi, atau dalam kata lain petugas pemberi stempel bagi kebijakan pemerintah.

Sejak awal terpilih, Prabowo-Gibran memang telah mengkonsolidasikan kekuasaan dengan merangkul sebanyak mungkin partai politik untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahannya. Upaya itu tercermin dalam pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang komposisinya juga mendominasi DPR. Sebanyak 470 kursi di DPR merupakan partai yang tergabung dalam koalisi KIM Plus.²⁰ Akibatnya, hampir tidak ada ruang tersisa untuk oposisi yang efektif.

Tumpuhnya fungsi DPR dan kecenderungannya melayani kepentingan pemerintah dapat terlihat dari proses legislasi yang tertutup, terburu-buru, minim partisipasi publik, dan serba setuju. Dalam proses pembahasan Revisi UU TNI misalnya, meski diklaim merupakan inisiatif DPR,

²⁰ [Bisnis.com](https://bisnis.com), "Peta Politik DPR 2024-2029: PDIP 110 Kursi Vs KIM Plus 470 Kursi", 26 Agustus 2024

pembahasan digenjut dan dijadikan program legislasi nasional (prolegnas) pasca Prabowo menerbitkan Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 pada 13 Februari 2025.

Baik pemerintah maupun DPR kompak mendorong pasal-pasal yang memungkinkan prajurit aktif dapat menempati jabatan sipil. Padahal hal tersebut jelas mengkhianati prinsip supremasi sipil yang merupakan agenda reformasi, dan bertentangan dengan prinsip meritokrasi dalam birokrasi. Selain itu, proses Revisi UU BUMN untuk melegitimasi Danantara juga dilakukan dengan pola serupa. Bahkan, pasca revisi disahkan, naskah undang-undang tersebut tak kunjung dipublikasikan secara terbuka.

Lebih jauh, DPR yang hanya bertindak sebagai tameng pemerintah dapat terlihat dari bungkamnya mereka terhadap kebijakan-kebijakan bermasalah. Dalam program MBG misalnya, DPR tak memberikan sikap kritis maupun pengawasan yang berarti. Padahal, MBG telah terbukti memboroskan anggaran, carut marut dari segi tata kelola, berjalan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, dan mengakibatkan keracunan terhadap puluhan ribu warga.

Di samping itu, pada akhir Agustus 2025, DPR justru memantik amarah publik lewat isu pemberian tunjangan perumahan senilai Rp50 juta. Tunjangan tersebut menjadikan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR bernilai fantastis yaitu lebih dari Rp100 juta per bulan.²¹ Kenaikan tunjangan tersebut juga diikuti dengan kenaikan dana reses dari semula Rp 400 juta menjadi Rp702 juta untuk periode 2024-2029. Dana yang besar tersebut bahkan tidak diiringi dengan transparansi dalam pelaksanaan dan penggunaan dana.

Gelapnya Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah memperlihatkan sinyal kegagalan serius dalam pemberantasan korupsi. Penegakan hukum berjalan mundur, pengawasan tumpul, dan prinsip pemerintahan yang baik secara sengaja diabaikan. Selain itu, agenda reformasi politik dan reformasi birokrasi yang mestinya mencegah praktik korupsi justru terabaikan, membuka celah penyelewengan yang lebih luas.

²¹ BBC Indonesia, "Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Lebih dari Rp100 Juta, untuk Apa Saja?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgvly37vplo>, 20 Agustus 2025

Pada waktu bersamaan, manipulasi hukum, rekayasa kebijakan dan anggaran dilakukan guna melayani kepentingan politik patronase dan kroniisme. Kabinet yang gemuk, diisi oleh pejabat dengan rekam jejak bermasalah, rangkap jabatan di posisi strategis, serta perwira TNI dan polisi aktif ikut memperparah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kondisi tersebut menandakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan terlaksana ke arah positif. Sehingga, perlu ada pengawasan publik yang lebih ketat terhadap jalannya pemerintahan, dan tekanan publik yang lebih kencang untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan sebagaimana mestinya. Fokus dapat ditujukan pada kerja-kerja aktor eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penegak hukum. Ini meliputi kebijakan, anggaran, putusan, dan lain sebagainya.

Dalam melakukannya, daya kritis warga perlu terus aktif agar tidak menelan mentah-mentah jargon serta klaim yang disampaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap kritis diperlukan guna menilai apakah kebijakan betul-betul berpihak kepada publik. Kritisisme menjadi penting untuk menghalau kecenderungan negara dalam memanipulasi opini publik.

Selain itu, fokus juga mesti diarahkan terhadap struktur ekonomi dan politik yang berkontribusi terhadap maraknya praktik korupsi. Alih-alih berpihak pada kepentingan publik, struktur tersebut justru hadir untuk melayani kepentingan oligarki dan kroni-kroni penguasa. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan hanya akan memperkuat praktik politik patronase dan kroniisme. Oleh sebab itu, memastikan agar sumber daya negara didistribusikan secara adil dan berpihak kepada kepentingan publik adalah sebuah keharusan.

